

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan dalam pembangunan nasional tak akan terjadi jika pelaksanaan pada pembangunan daerah yang menjadi konsentrasi utama tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jika diingat kembali bahwasanya Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan ini harus terasa sampai ke masyarakat menengah hingga terkecil sekalipun. UUD 45 secara jelas menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan segala kehidupan bangsa. Sesuai dengan cita-cita yang tertulis dalam UUD 45 tersebut maka dilakukan pembangunan di bidang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang berhasil tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga terselesaikannya masalah-masalah ekonomi yang sering kali ditemui di berbagai negara, salah satunya adalah permasalahan tenaga kerja. Kesempatan kerja adalah hal yang seringkali menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Angkatan kerja ialah masyarakat yang memasuki umur untuk bekerja. Kesempatan kerja ditentukan ketika banyaknya perusahaan yang berhasil menyerap angkatan kerja. Tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia adalah alasan utama

mengapa ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan. Kenaikan angkatan kerja yang signifikan menjadi permasalahan dalam suatu negara ketika tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada, kondisi ini menimbulkan naiknya angka pengangguran dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Adanya kesempatan kerja yang tinggi akan menyerap angkatan kerja lebih optimal diiringi dengan kemajuan ekonomi masyarakat akan semakin baik. Masyarakat yang sejahtera dapat diukur dengan terpenuhinya hidup mereka. Dengan adanya upah maka masyarakat bisa membeli apapun yang mereka butuhkan seperti makanan, pakaian dan lain-lain.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi salah satu tujuan yang dilakukan pemerintah yang nantinya akan berdampak kepada terselesaikannya masalah ketenagakerjaan. Tujuan-tujuan pembangunan ekonomi di suatu negara yang lainnya meliputi meningkatnya ketersediaan dan perluasan distribusi pada macam barang dalam kehidupan pokok, meningkatnya penyediaan lapangan kerja, pendapatan, dan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi juga dapat memperluas pilihan seseorang terhadap kehidupan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wihastuti & Rahmatullah (2018)¹ variabel Produk Domestik Regional Bruto dan upah minimum terbukti dapat mempengaruhi kenaikannya penyerapan tenaga kerja secara positif dan signifikan, sehingga setiap adanya kenaikan PDRB dan Upah Minimum akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, *ceteris paribus*.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menghadapi masalah penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakatnya, tenaga kerja memiliki peranan penting dalam proses produksi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan jumlah penduduk dari luar daerah untuk mencari pekerjaan atau sedang mengenyam pendidikan tetapi sekaligus bekerja paruh waktu. Terkadang seseorang yang tadinya berniat datang ke DIY untuk mengejar pendidikan, karena ia tertarik dengan provinsi ini maka tidak jarang mereka mengganti status kependudukan dari kota asalnya dan menjadi penduduk DIY.

TABEL 1.1.

Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015-2018

Kegiatan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Penduduk Berumur >15 Tahun	2.536.556	2.917.652	2.960.204	2.987.330
Angkatan Kerja	1.971.463	2.099.436	2.117.187	2.191.742
Bekerja	1.891.218	2.042.400	2.053.168	2.118.392
Pengangguran	80.245	57.036	64.019	73.350
Bukan angkatan kerja	824.293	818.216	843.017	795.588
Sekolah	297.972	273.286	266.870	247.191
Mengurus Rumah Tangga	138.148	430.895	472.108	452.310
Lainnya	1.891.218	114.035	104.039	96.087

Sumber : (BPS DIY 2019)

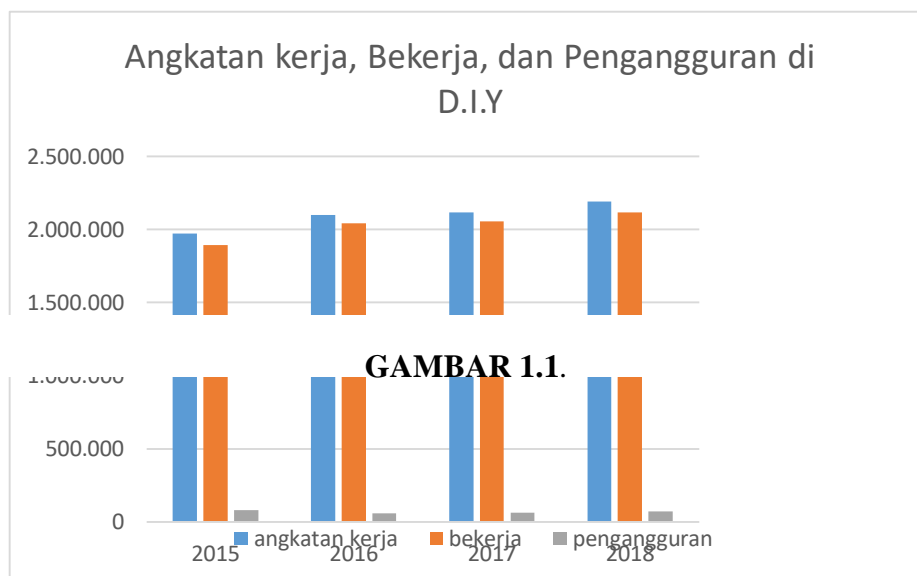
Dari Tabel 1.1 bahwa terlihat selalu adanya kenaikan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Gambar di atas kenaikan jumlah angkatan kerja yang terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 2.987.330 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 64.019 menjadi 73.350, hal ini masih wajar dikarenakan jumlah angkatan kerja juga mengalami kenaikan. Walaupun demikian, jika dirata-ratakan dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018 menunjukkan grafik yang menurun terlihat pada

Gambar 1.1, artinya angkatan kerja banyak terserap. Bila dilihat dari sudut pembangunan sarana prasarana, DIY pada tahun 2018 terakhir mengalami penambahan fasilitas infrastruktur, kantor, maupun tempat rekreasi. Dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, di daerah tertentu seperti kabupaten bantul masih jarang terlihat bangunan yang dapat menyerap tenaga kerja penduduk.

Sumber : (BPS DIY 2019)

**Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2015-2018**

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Grafik pengangguran pada



gambar di atas juga mengalami penurunan pada tahun 2016, tahun 2016 adalah tahun yang menunjukkan jumlah pengangguran paling sedikit di D.I Yogyakarta dengan angka angkatan kerja yang tidak jauh dari tahun sebelumnya, tetap mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sampai 2018 beriringan dengan naiknya jumlah angkatan kerja dan banyaknya angkatan kerja yang terserap.

Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlihat dari jumlah penduduk yang bekerja di berbagai lapangan usaha. Berikut Tabel jumlah penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2015-2018:

TABEL 1.2.
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
di Daerah Istimewa Yogyakarta (Ribu Jiwa)

Lapangan Usaha	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
1. Pertanian	436	475	451	432
2. Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air	290	291	330	369
3. Industri Pengolahan	276	262	340	346
4. Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan	485	589	571	601
5. Jasa-jasa	401	423	359	368
Total	1.888	2.040	2.051	2.116

Sumber: (BPS DIY 2019)

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa sektor Perdagangan Besar, Eceran, dan Rumah Makan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Di provinsi Yogyakarta sudah banyak UMKM yang bertambah setiap tahunnya. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua adalah pertanian yang menyerap tenaga kerja kedua. Namun, sektor pertanian ini dari tahun 2015-2018 semakin lama semakin mengalami penurunan itu dikarenakan masyarakat lebih banyak beralih untuk bekerja pada sektor UMKM. Penyerapan tenaga kerja terendah berada pada sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air berbeda tipis dengan sektor industri pengolahan. Dalam periode tersebut penyerapan tenaga kerja senantiasa mengalami kenaikan.

Dalam pasar tenaga kerja, adanya peningkatan jumlah angkatan kerja menjadikan jumlah penawaran kerja juga semakin meningkat. Adanya selisih antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja ini yang mengakibatkan pengangguran

yang mana dapat menggoyahkan kestabilan ekonomi dan keamanan suatu daerah sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak dapat terwujud.

Berikut tabel mengenai pencari kerja serta tenaga kerja yang ditempatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

TABEL 1.3.
Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan di
Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)

Tahun	Pendaftaran	Penempatan/Penghapusan	Sisa Pendaftaran
2015	55.712	13.621	42.091
2016	55.051	14.311	40.740
2017	56.546	15.179	41.367

Sumber: (BPS DIY 2019)

Dari Tabel di atas menunjukkan jumlah pendaftar pencari kerja mengalami kenaikan pada tahun 2015 tetapi pada tahun 2016 pencari pekerjaan menurun, kemudian pada tahun 2018 jumlah peserta pendaftar mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai angka 56.546. Penempatannya bersifat fluktuatif naik turun, tetapi tidak dapat menyerap seluruh pencari kerja, sehingga masih banyak sisa pencari kerja yang mendaftar pada tahun tersebut.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan hadist Al-Bukhari:

دَنَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya: "Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya".

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2008). Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal karena keaslian tempat wisatanya yang mana setiap tahunnya Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mendatangkan ribuan bahkan ratusan wisatawan yang berkunjung. Hal ini membuat Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik untuk para investor dalam negeri melakukan investasi. Investasi pada sektor swasta adalah pendukung pembangunan nasional serta mampu memperluas penyerapan pekerjaan karena dengan naiknya angka pengunjung setiap tahunnya maka pergerakan perekonomian di Daerah Istimewa akan meningkat. Demikian pula ketika adanya investasi-investasi maka akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja bekerja dan pada akhirnya keadaan itu mampu untuk mengurangi pengangguran.

Faktor yang mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja selanjutnya adalah upah. Bagi perusahaan yang ingin mencapai keuntungan yang optimal, upah merupakan biaya produksi sehingga perusahaan tersebut akan meminimalkan biaya produksinya. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi (sumarsono, 2003). Diasumsikan ketika harga produk naik, permintaan terhadap produk akan menurun. Akibatnya banyak barang yang pada akhirnya tidak terjual dan

produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya, dengan asumsi perusahaan tersebut menggunakan teknologi padat karya. Penurunan target produksi perusahaan memaksa produsen mengurangi jumlah produk yang dihasilkan kemudian mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan pekerjaan. Ketika upah minimum tenaga kerja lebih tinggi daripada tingkat upah keseimbangan, maka permintaan akan tenaga kerja akan turun. Sebaliknya, ketika upah minimum tenaga kerja lebih rendah daripada tingkat upah keseimbangan maka permintaan akan tenaga kerja oleh perusahaan dan kesempatan kerja akan meningkat (Mankiw, 2007).

Pembangunan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ketika terjadi peningkatan produksi penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Semakin besarnya penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja guna meningkatkan produksinya.

Pada dimensi masalah ketenagakerjaan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki permasalahan pokok yang ditandai oleh lebih rendahnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang tersedia. Dalam situasi seperti ini kesempatan kerja perlu ditumbuhkan dengan laju melebihi pertumbuhan angkatan kerja untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di masa mendatang. Pembangunan suatu daerah atau suatu negara didasarkan pada interaksi dari berbagai kelompok variabel yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain. Maka dari itu pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya. Manusia sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Ketenagakerjaan yang merupakan aspek mendasar kehidupan ekonomi dan sosial. Sasaran pembangunan

ekonomi adalah untuk mensejahterakan penduduknya dan juga menyediakan lapangan kerja.

Berdasarkan masalah di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2018”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY.

3. Untuk mengetahui pengaruh Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di DIY.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak dan instansi yang terkait sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan atau pengambil keputusan dalam hal ini menentukan kebijakan dalam peluang kesempatan kerja dan menjadi bahan untuk menambah wawasan dalam berfikir terkait dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan pembandingan dan referensi untuk kedepannya bagi peneliti yang tertarik untuk membahas masalah investasi, upah minimum, dan Produk Domestik Bruto.
- b. Bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan rujukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah.

